



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026 : 105 – 114

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIJA>

DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8784

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) dalam Manajemen Konflik di Kabupaten Tabanan

PAGAR DESA Innovation (Village Conflict Vulnerability and Disturbance Mapping) in Conflict Management in Tabanan Regency

¹Ni Putu Dinda Kalpika Putri; ²I Gusti Agung Ayu Made Risma Kemala Dewi

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Indonesia

Email: dindakalpika94@gmail.com

(Diterima: 29-Mei-2026; Ditelaah: 18-Juli-2026; Disetujui: 24-Juli-2026)

ABSTRAK

Masyarakat adat di Provinsi Bali berpedoman dengan nilai-nilai konsep *Tri Hita Karana* dalam proses kehidupan sosial. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, namun pada kenyataannya konflik yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dihindari. Kabupaten Tabanan eripakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki kompleksitas sosial dan potensi konflik yang dipicu oleh beberapa hal yaitu masalah sengketa lahan, batas adat dan dampak pembangunan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Tabanan berinovasi untuk menangani potensi konflik dengan meluncurkan inovasi Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa (PAGAR DESA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PAGAR DESA dalam manajemen konflik di Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PAGAR DESA belum berjalan dengan optimal, namun adanya inovasi ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam membangun sistem deteksi dini konflik agar lebih terstruktur.

Kata kunci: digital innovation, management konflik, PAGAR DESA, local goverment, tabanan.

Ni Putu Dinda Kalpika Putri; I Gusti Agung Ayu Made Risma Kemala Dewi (2026). *Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) dalam Manajemen Konflik di Kabupaten Tabanan*

ABSTRACT

Indigenous communities in Bali Province adhere to the values of the Tri Hita Karana philosophy in their social life. This principle is also recognized in Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019. However, in practice, conflicts arising within communities remain unavoidable. Tabanan Regency is one of the regencies in Bali Province characterized by social complexity and various potential sources of conflict, including land disputes, customary territorial boundary issues, and the impacts of tourism development. To address these potential conflicts, the Tabanan Regency Government introduced an innovation known as the Village Conflict Disturbance and Vulnerability Mapping System (PAGAR DESA). This study aims to examine the implementation of PAGAR DESA in conflict management in Tabanan Regency. The research employed a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the implementation of PAGAR DESA has not yet been fully optimized. Nevertheless, this innovation reflects the commitment of the Tabanan Regency Government to developing a more structured conflict early warning and detection system.

Keywords: digital innovatio, conflict management, PAGAR DESAR, local government, tabanan regency

A. PENDAHULUAN

Konflik pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara individu maupun kelompok disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai maupun persepsi (Baharudin, 2022). Konflik memiliki sifat yang sangat bertolak belakang dengan integrasi, karena integrasi sendiri berlangsung sebagai proses siklus dalam masyarakat. Konflik yang dapat dikendalikan dengan baik biasanya akan mengarah pada terciptanya integrasi, sementara integrasi yang tidak berlangsung secara utuh justru dapat menjadi pemicu konflik (Arthadana, 2025). Diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya pengelolaan dan pengendalian konflik secara sistematis guna mendukung terciptanya integrasi sosial di tingkat masyarakat.

Dinamika tersebut juga terjadi dalam kehidupan masyarakat desa adat, khususnya di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat kental. Pada umumnya, masyarakat Bali mengimplementasikan nilai-nilai dalam konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan tiga hubungan harmonis antara manusia dengan pencipta (*parahyangan*), hubungan harmonis manusia dengan alam (*palemahan*) dan hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia lainnya (*pawongan*). Dalam konteks manajemen konflik, nilai-nilai *Tri Hita Karana* sangat memengaruhi strategi penyelesaian konflik yang digunakan masyarakat desa adat.

Nilai *pawongan* mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi untuk menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat. Nilai *parahyangan* membentuk kesadaran moral bahwa setiap penyelesaian konflik harus dilakukan dengan menjunjung nilai keadilan dan tanggung jawab spiritual. Sementara itu, nilai *palemahan* mengarahkan penyelesaian konflik agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di desa adat lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (*restorative*) daripada semata-mata menentukan pihak yang menang atau kalah.

Ni Putu Dinda Kalpika Putri; I Gusti Agung Ayu Made Risma Kemala Dewi (2026). Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) dalam Manajemen Konflik di Kabupaten Tabanan

Prinsip tersebut dipertegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pada Pasal 6, yang menyatakan bahwa desa adat merupakan wadah pelaksanaan nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa konflik di desa adat masih kerap terjadi dan belum terselesaikan secara optimal (Bontot, 2023). Fenomena konflik dalam masyarakat desa adat tersebut juga dapat ditemukan di berbagai wilayah di Bali, salah satunya di Kabupaten Tabanan. Kabupaten ini memiliki 133 desa, 334 desa adat, dan 729 banjar adat sehingga memiliki dinamika sosial yang kompleks. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025, tercatat terdapat 49 konflik sosial di Provinsi Bali, dengan 3 kasus yang terjadi di Kabupaten Tabanan.

Konflik yang sering terjadi di Kabupaten Tabanan umumnya dipicu oleh masalah sengketa lahan, batas adat dan dampak pembangunan pariwisata. Dalam menghadapi kondisi tersebut, penerapan manajemen konflik menjadi suatu kebutuhan penting guna mengendalikan serta mengarahkan konflik ke arah yang konstruktif (Sabir, 2023). Namun demikian, praktik manajemen konflik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah cenderung masih bersifat reaktif dan administratif yaitu fokus pada penyelesaian konflik setelah konflik itu terjadi (Adysti & Maryanah, 2026). Pendekatan tersebut belum mampu menyentuh akar permasalahan secara substantif serta belum optimal dalam mengantisipasi potensi konflik yang muncul dikemudian hari.

Pelaporan konflik di tingkat desa selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, salah satunya adalah penggunaan media komunikasi informal seperti WhatsApp yang tidak terintegrasi dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan data pelaporan konflik yang dihasilkan menjadi kurang akurat serta akan berdampak pada lambatnya proses respon dalam penanganan konflik. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen konflik di tingkat lokal belum didukung oleh sistem informasi yang mampu mengelola data konflik secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sangat diperlukan suatu inovasi dalam manajemen konflik yang tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga mampu mengidentifikasi serta memetakan potensi konflik secara sistematis. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) meluncurkan inovasi Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa (PAGAR DESA). Berbeda dengan sistem pelaporan yang ada sebelumnya hanya mengandalkan pelaporan secara manual dan belum terdokumentasi secara sistematis. Program ini dirancang untuk memperkuat sistem deteksi dini potensi konflik sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis *website*.

Kehadiran PAGAR DESA diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut melalui sistem pelaporan yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis data (Bidang PISKIP, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa digitalisasi administrasi pedesaan di negara berkembang berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, meskipun keterbatasan akses teknologi, kesenjangan literasi digital, serta infrastruktur yang belum memadai masih menjadi tantangan utama

dalam penerapannya (Sarjito, 2023). Selain itu, keberadaan PAGAR DESA menunjukkan adanya ruang kajian yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas penyelesaian konflik desa adat melalui mekanisme adat, mediasi, maupun pendekatan hukum. Penelitian ini berfokus pada implementasi inovasi digital PAGAR DESA sebagai manajemen konflik di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan konflik di tingkat desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sistematis melalui pemanfaatan data dan teknologi. Inovasi Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa (PAGAR DESA) menjadi salah satu strategi yang menarik untuk dikaji dalam penerapan manajemen konflik di Kabupaten Tabanan, karena menawarkan mekanisme deteksi dini yang lebih terstruktur dalam mengidentifikasi potensi konflik di masyarakat. Meskipun demikian, penerapan inovasi tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait bagaimana penerapan inovasi PAGAR DESA dalam manajemen konflik di Kabupaten Tabanan serta sejauh mana inovasi ini mampu mendukung upaya pencegahan dan penanganan konflik secara lebih efektif di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi PAGAR DESA dalam mendukung deteksi dini serta penanganan konflik di Kabupaten Tabanan

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data berupa tuturan lisan maupun tulisan dari subjek penelitian, termasuk perilaku serta situasi yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan inovasi PAGAR DESA berbasis website dalam manajemen konflik di Kabupaten Tabanan. Pendekatan ini dipilih karena lebih menekankan pada pemaknaan dan konteks sosial, bukan data yang bersifat numerik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tabanan, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabanan serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian selama 4 bulan dari Bulan April-Juli 2026.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan, kewenangan, serta keterlibatan langsung dalam penerapan inovasi PAGAR DESA. Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, yang terdiri atas Kepala Bidang I pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabanan serta Kepala Subbagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabanan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña,

yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan model manajemen konflik yang digunakan untuk memahami penerapan inovasi PAGAR DESA di Kabupaten Tabanan.

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) Kabupaten Tabanan diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis *website*. Melalui sistem ini, aparat desa bersama Kasi Trantib Kecamatan dapat melaporkan potensi gangguan keamanan secara *real-time*. Berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi Bali pada semester pertama tahun 2025, tercatat sebanyak 49 konflik sosial yang terjadi di seluruh Bali, terdapat 3 kasus di Kabupaten Tabanan. Salah satunya yaitu konflik antara Desa Adat Buruan dengan Desa Adat Sesandan yang muncul karena tapal batas (detik.com, 2026).

Inovasi PAGAR DESA sejalan dengan visi pembangunan daerah periode 2021-2026 yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM)”. Dalam aspek aman, tidak hanya dimaknai sebagai kondisi bebas dari gangguan keamanan secara fisik, tetapi juga mencakup terciptanya stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat melalui pengelolaan konflik yang efektif. Inovasi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial berbasis teknologi informasi.

Penerapan PAGAR DESA juga mencerminkan upaya mewujudkan aspek unggul melalui pemanfaatan inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penggunaan sistem pelaporan berbasis *website* menunjukkan transformasi dalam pola manajemen konflik dari konvensional menuju digitalisasi. Pada aspek madani, tercermin dalam pola penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, kolaborasi serta penghormatan terhadap nilai adat dan budaya lokal (tabanankab.go.id, 2026). Inovasi ini akan dikembangkan secara bertahap, tahun 2025 fokus pada pelaksanaan diarahkan pada tahap perencanaan, pembentukan tim, uji coba sistem, serta sosialisasi di beberapa desa percontohan. Selanjutnya pada tahap menengah periode Oktober – Desember 2025, sistem akan dievaluasi dan disempurnakan. Sementara itu, pada 2026 – 2027 akan ditargetkan dapat terintegrasi secara penuh dan bisa digunakan di seluruh desa di Kabupaten Tabanan (diskominfo.tabanankab.go.id, 2025).



Gambar 1. Tampilan Website Kesbangpol Kabupaten Tabanan
Sumber: <https://bakesbangpol.tabanankab.go.id/>

Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan telah menyediakan berbagai menu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti profil instansi, layanan administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, berita, galeri, serta informasi mengenai program kerja. Tampilan *website* juga menunjukkan adanya pembaruan informasi melalui fitur *Main Story*, *Editor's Picks*, dan *Trending Story*, sehingga dapat menjadi media penyebaran informasi kepada masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan, *website* masih lebih banyak berfungsi sebagai media publikasi informasi dibandingkan sebagai media interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Fitur pelayanan publik yang bersifat partisipatif, seperti penyampaian aspirasi, pengaduan, atau forum diskusi, belum terlihat menonjol pada halaman utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *website* dalam mendukung komunikasi dua arah masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, *website* Kesbangpol Kabupaten Tabanan telah mendukung aspek keterbukaan informasi publik, tetapi masih perlu pengembangan dari sisi layanan digital yang lebih interaktif agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pelayanan publik melalui teknologi digital.



Gambar 2. Alur Penggunaan PAGAR DESA Kesbangpol Tabanan
Sumber: <https://diskominfo.tabanankab.go.id/tabanan-kembangkan-inovasi-digital-pagar-desa-untuk-deteksi-dini-konflik-sosial/>

Berdasarkan alur pelaporan pada aplikasi PAGAR DESA, terlihat adanya mekanisme pelaporan konflik yang dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi pelapor, penyampaian

Ni Putu Dinda Kalpika Putri; I Gusti Agung Ayu Made Risma Kemala Dewi (2026). Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) dalam Manajemen Konflik di Kabupaten Tabanan

informasi mengenai potensi konflik, hingga proses tindak lanjut oleh pihak yang berwenang. Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap laporan diproses melalui prosedur yang jelas sehingga memudahkan proses verifikasi dan penanganan konflik. Keberadaan alur yang terstruktur ini berkontribusi terhadap efektivitas manajemen konflik karena memungkinkan pemerintah memperoleh informasi secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Melalui laporan yang disampaikan sejak munculnya potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabanan dapat melakukan deteksi dini, menganalisis situasi, serta mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar. Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital PAGAR DESA juga meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam proses penanganan konflik, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis informasi yang tersedia.

Diskusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan penerapan PAGAR DESA di Kabupaten Tabanan belum berjalan dengan optimal. Kehadiran PAGAR DESA dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pelaporan konflik yang lebih cepat, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hasil wawancara dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Tabanan dikembangkan sebagai sistem berbasis website yang memungkinkan masyarakat maupun perangkat desa melaporkan potensi konflik secara lebih sistematis.

Penerapan PAGAR DESA ini akan dianalisis menggunakan model manajemen konflik Thomas-Kilmann dalam jurnal Ramadhani *et al.*, (2025). Pemilihan model Thomas-Kilmann didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian yang tidak hanya melihat keberadaan konflik, tetapi juga melihat bagaimana pihak-pihak yang terlibat melakukan pengelolaan terhadap potensi konflik yang telah teridentifikasi melalui inovasi PAGAR DESA. Dengan mengidentifikasi lima gaya manajemen konflik, model ini banyak digunakan oleh spesialis sumber daya manusia di seluruh dunia karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam situasi konflik. diantaranya:

1. Gaya manajemen konflik kolaboratif, dikenal sebagai teori *win-win solution*, melibatkan tingkat ketegasan dan kolaborasi yang tinggi (Arifin *et al.*, 2025). Berdasarkan hasil penelitian, pola penyelesaian konflik di Kabupaten Tabanan cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai aktor dalam proses penyelesaian konflik, mulai dari masyarakat, banjar, desa adat, pemerintah desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rozikin, 2024) yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena kolaborasi dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Tabanan juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan sosial masyarakat adat.
2. Gaya manajemen konflik akomodatif, dikenal sebagai gaya mengatasi konflik dengan cara mengalah atau mengesampingkan kepentingan pribadi, serta bersedia berkorban demi menjaga hubungan dengan pihak lain yang sedang mengalami konflik (Firmansyah & Prasetyo, 2023). Gaya ini efektif dalam situasi di mana

masalah konflik tidak sepenting hubungan antar pihak. Meskipun gaya ini dapat terlihat lemah, ia dapat membangun reputasi positif bagi manajer dalam situasi yang tidak krusial. Namun, jika diterapkan pada masalah yang lebih penting, gaya ini dapat menciptakan persepsi kelemahan.

Gaya akomodatif juga dominan dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini tercermin dari kecenderungan pihak yang berkonflik untuk menahan diri demi menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat. Konflik tapal batas desa adat yang ada di Kabupaten Tabanan meredam sementara waktu agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan adat dan hubungan sosial masyarakat.

3. Gaya manajemen konflik kompromi merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam organisasi. Dalam gaya ini, pihak-pihak yang terlibat mengakui sebagian kebutuhan mereka untuk mencapai solusi yang memuaskan bersama (Suryani, 2024). Meskipun ini dapat mempercepat penyelesaian masalah, sering kali dapat menimbulkan frustrasi jika digunakan secara berulang. Gaya ini lebih cocok untuk situasi yang mendesak daripada untuk menemukan solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan juga penggunaan gaya kompromi dalam penyelesaian konflik. Pemerintah dan pihak terkait berupaya mencari jalan tengah melalui mediasi dan negosiasi guna mendapatkan solusi yang diterima oleh semua pihak. Namun, pada konflik tertentu seperti sengketa tapal batas desa adat, penyelesaian konflik tidak selalu dapat diselesaikan melalui kompromi karena memerlukan proses hukum lebih lanjut.

4. Gaya manajemen konflik menghindari, merupakan strategi untuk menarik diri dari situasi konflik dan bersikap netral tanpa terlibat dalam konsekuensi apapun (Suryani, 2024). Dalam beberapa kasus, menghindari konflik dapat memberikan waktu untuk merenung dan menemukan solusi yang lebih baik. Gaya menghindari juga ditemukan dalam beberapa situasi tertentu. Penundaan penanganan konflik dilakukan sebagai strategi untuk mencegah konflik menjadi lebih besar dan menjaga kondusivitas masyarakat. Pendekatan ini biasanya dilakukan ketika situasi sosial dinilai belum memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian secara langsung. Meskipun demikian, konflik yang terjadi pada umumnya tetap dipantau dan tidak sepenuhnya diabaikan oleh pemerintah daerah.
5. Gaya manajemen konflik bersaing merupakan gaya ini melibatkan pengabaian terhadap kepentingan diri sendiri serta berupaya memperoleh kemenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain (Faqrurrowzi et al., 2023). Dalam gaya ini, satu pihak berusaha untuk menang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pihak lain. Meskipun gaya ini dapat menghasilkan keputusan cepat dalam situasi yang mendesak, ia juga dapat menciptakan kebencian dan frustrasi di antara rekan kerja. Gaya ini sering kali membuat individu terlihat sebagai pemimpin yang kuat, tetapi dapat merusak hubungan jangka panjang.

Gaya bersaing terlihat dalam kondisi tertentu ketika pemerintah perlu mengambil keputusan tegas demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan pendekatan ini cenderung menjadi pilihan terakhir apabila proses mediasi dan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

Penerapan PAGAR DESA belum sepenuhnya berjalan optimal, namun program ini menunjukkan adanya upaya Pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam membangun sistem deteksi dini konflik yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi informasi. Pola manajemen konflik melalui PAGAR desa itu didominasi oleh pendekatan kolaboratif, akomodatif dan kompromi yang dipengaruhi oleh kuatnya nilai adat, budaya lokal dan prinsip keharmonisan sosial masyarakat Bali

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu upaya konkret Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat manajemen konflik melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis website. Inovasi ini dirancang untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis data, sehingga proses pelaporan serta pemetaan potensi konflik sosial di tingkat desa dapat dilakukan secara lebih sistematis dibandingkan pola pelaporan konvensional yang selama ini masih mengandalkan komunikasi informal seperti WhatsApp.

Dilihat dari pola penyelesaian konfliknya, penerapan manajemen konflik di Kabupaten Tabanan melalui model Thomas-Kilmann menunjukkan dominasi gaya kolaboratif, akomodatif, dan kompromi. Gaya kolaboratif tercermin dari keterlibatan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, banjar, desa adat, pemerintah desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten dalam proses penyelesaian konflik. Gaya akomodatif dan kompromi juga banyak digunakan sebagai wujud upaya menjaga keharmonisan sosial, sejalan dengan nilai-nilai Tri Hita Karana yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bali. Sementara itu, gaya menghindari dan bersaing hanya digunakan pada situasi dan kondisi tertentu yang bersifat mendesak, sehingga bukan menjadi pola dominan dalam penyelesaian konflik di wilayah ini.

Meskipun demikian, penerapan PAGAR DESA saat ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejumlah kendala seperti keterbatasan sosialisasi kepada aparat desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta belum meratanya kesiapan infrastruktur dan literasi digital di tingkat desa masih menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Sarjito (2023) yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pedesaan di negara berkembang berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan PAGAR DESA ke depan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kelembagaan dalam mengoperasikannya secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian mengenai integrasi teknologi digital dan kearifan lokal dalam manajemen konflik di tingkat pemerintahan daerah, khususnya pada masyarakat desa adat. Sebagai rekomendasi, Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu memperkuat sosialisasi dan pelatihan penggunaan

sistem PAGAR DESA kepada aparat desa dan masyarakat, meningkatkan fitur interaksi dua arah pada website Kesbangpol agar lebih partisipatif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas PAGAR DESA setelah diterapkan secara penuh di seluruh desa di Kabupaten Tabanan, termasuk dampaknya terhadap penurunan angka konflik sosial dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adysti, J., & Maryanah, T. (2026). Kebijakan Penataan Ruang terhadap Konflik Sosial Kebijakan Revitalisasi Pasar Dekon Lampung Utara. *Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi*, 23(1), 36–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.94143>
Published:
- Arifin, Z., Safitri, N. N., Zuhro, R. H., & Hasan, A. A. (2025). Manajemen Konflik dalam Pendidikan : Pendekatan Kolaboratif di Sekolah. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3(1), 38–53.
- Arthadana, M. G. (2025). Penguatan Peran Desa Adat dalam Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(11), 2469–2478.
- Baharudin. (2022). Konflik Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Multikasus di Bima Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 3(2), 209–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/diksi.v3i2.207>
- Bidang PISKP. (2025). *Tabanan Kembangkan Inovasi Digital "PAGAR DESA" untuk Deteksi Dini Konflik Sosial*. 30 September. [https://diskominfo.tabanankab.go.id/tabanan-kembangkan-inovasi-digital-pagar-desa-untuk-deteksi-dini-konflik-sosial/#:~:text=Tabanan Kembangkan Inovasi Digital "PAGAR,Sosial - Dinas Komunikasi dan Informatika](https://diskominfo.tabanankab.go.id/tabanan-kembangkan-inovasi-digital-pagar-desa-untuk-deteksi-dini-konflik-sosial/#:~:text=Tabanan Kembangkan Inovasi Digital)
- Bontot, I. N. (2023). Konflik Pada Desa Adat di Bali : Masalah dan Solusi Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1042>
- detik.com. (2026). *Dua Desa Adat di Tabanan Bersitegang gegara Tapal Batas*. 10 Maret. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8393830/dua-desa-adat-di-tabanan-bersitegang-gegara-tapal-batas>
- diskominfo.tabanankab.go.id. (2025). *Tabanan Kembangkan Inovasi Digital "PAGAR DESA" untuk Deteksi Dini Konflik Sosial*. 30 September. <https://diskominfo.tabanankab.go.id/tabanan-kembangkan-inovasi-digital-pagar-desa-untuk-deteksi-dini-konflik-sosial/>
- Faqrurrowzi, L., Dharma, H., & Pendidikan, P. A. (2023). Manajemen Konflik dalam Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 12(2), 92–102.
- Firmansyah, R., & Prasetyo, L. (2023). Manajemen Konflik Pada Franchise Roti Bakar Gandaria Magetan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 165–175. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2018>
- Ramadhani, A. I., Putri, D., Kusuma, H. P., Risqi, M., Putri, T. N., & Mu'alimin. (2025). Teori Manajemen Konflik. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 116–124.
- Ni Putu Dinda Kalpika Putri; I Gusti Agung Ayu Made Risma Kemala Dewi (2026). *Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) dalam Manajemen Konflik di Kabupaten Tabanan*

- <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.635>
- Rozikin, M. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial antar Organisasi Kemasyarakatan The Collaborative Governance in the Institutional Handling of Social Conflict between. *Jurnal Pecerah Publik*, 11(1), 17-27.
- Sabir. (2023). *Gaya Komunikasi Kepala Desa dalam Manajemen Konflik Kepentingan di Desa Bakaru*.
- Sarjito, A. (2023). Dampak Digitalisasi Administrasi Perdesaan di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 106-124. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3814>
- Suryani, L. (2024). THE GENDER RELATION TOWARD CONFLICT MANAGEMENT STYLE IN TABALONG REGENCY. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(2), 114-126. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i2.961>
- tabanankab.go.id. (2026). *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*. <https://bakesbangpol.tabanankab.go.id/>